



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR: G/ 372 /B.07/HK/2021

TENTANG

PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, perlu menetapkan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Menetapkan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, menjadi pedoman untuk penataan dan penyempurnaan di bidang Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/437/B.09/HK/2018, tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6-7-2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 202 /B.07/HK/2021
TANGGAL: 6 - 7 - 2021

REKAPITULASI ANALISIS BEBAN KERJA (ABK)

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN	NILAI BEBAN KERJA/ EFEKTIFITAS JABATAN (EJ)	HASIL ABK	KELEBIHAN/ KEKURANGAN	PJ	Efektifitas Unit (EU)	PU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH	1	1,455	1	0	A		
2	SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH	0	1,269	1	0	A	1,5545	A
3	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1	1,179	1	0	A		
4	- Analis Tata Usaha	2	1,847	2	0	A		
5	- Analis Data dan Informasi	1	1,3	1	0	A		
6	- Pengelola Surat	0	1,392	1	-1	A		
7	- Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	1	1,353	1	0	A		
8	- Pengadministrasi Umum	3	2,5	3	0	A		
9	- Pramu Bakti	1	2,033	2	-1	A		
10	- Pengemudi	0	1	1	-1	A		
11	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET	1	1,172	1	0	A		
12	- Analis Laporan Keuangan	0	1,333	1	-1	A		
13	- Analis Transaksi Keuangan	1	1,333	1	0	A		
14	- Bendahara	0	1,128	1	-1	A		
15	- Pengelola Keuangan	0	1,38	2	-2	A		
16	- Pengadministrasi Keuangan	3	2,98	3	0	A		
17	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN ANGGARAN	1	1,197	1	0	A		
18	- Analis Perencanaan	0	1,32	1	-1	A		
19	- Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	0	1,34	1	-1	A		
20	- Pengadministrasi Perencanaan dan Program	3	3,46	3	0	A		
21	KEPALA BIDANG IDEOLOGI , WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA	1	1,476	1	0	A	1,5997	A
22	KEPALA SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	1	1,165	1	0	A		
23	- Analis Wawasan Kebangsaan	3	2,613	3	0	A		
24	- Analis Ideologi	0	1,427	1	-1	A		
25	- Pengelola Data	0	1,38	1	-1	A		
26	KEPALA SUB BIDANG BELA NEGARA DAN KARAKTER BANGSA	1	1,136	1	0	A		
27	- Analis Dialog dan Wawasan Multikultural	1	1,307	1	0	A		
28	- Analis Pembelajaran Pembinaan Pendidikan Masyarakat	0	1,44	1	-1	A		
29	- Pengadministrasi Umum	2	2,453	2	0	A		
30	KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK	1	1,121	1	0	A	1,4455	A
31	KEPALA SUB BIDANG KEWASPADAAN DINI DAN KERJASAMA INTELEJEN	1	1,189	1	0	A		
32	- Analis Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing	1	1,333	1	0	A		
33	- Analis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	2	1,533	2	0	A		
34	- Pengadministrasi Umum	1	1,687	2	-1	A		
35	KEPALA SUB BIDANG PENANGANAN KONFLIK	1	1,212	1	0	A		
36	- Analis Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	1	1,393	1	0	A		
37	- Analis Program Kerjasama Lembaga Masyarakat	2	1,613	2	0	A		
38	- Pengadministrasi Umum	1	1,927	2	-1	A		
39	KEPALA BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, AGAMA, DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	1	1,392	1	0	A	1,5673	A
40	KEPALA SUB BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA	1	1,212	1	0	A		
41	- Analis Budaya Keagamaan	1	1,28	1	0	A		
42	- Analis Sosial Budaya	1	1,373	1	0	A		

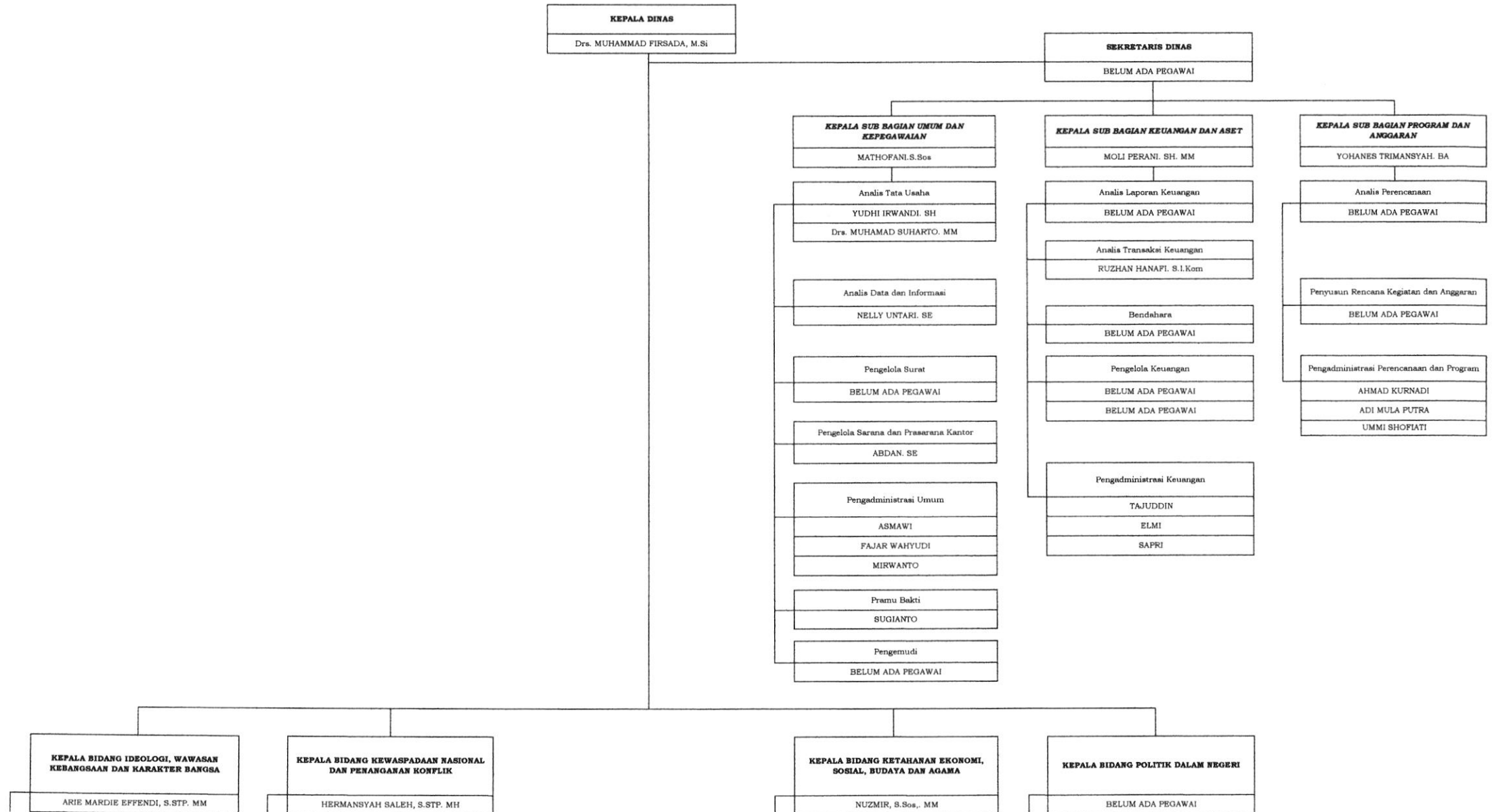
NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN	NILAI BEBAN KERJA/ EFEKTIFITAS JABATAN (EJ)	HASIL ABK	KELEBIHAN/ KURANGAN	PJ	Efektifitas Unit (EU)	PU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	- Pengadministrasi Umum	0	2,46	2	-2	A		
44	KEPALA SUB BIDANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN	1	1,161	1	0	A		
45	- Analisis Organisasi Masyarakat	0	1,42	1	-1	A		
46	- Analisis Pemberdayaan Masyarakat	0	1,42	1	-1	A		
47	- Pengadministrasi Umum	1	2,387	2	-1	A		
48	KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI	0	1,307	1	-1	A	1,4726	A
49	KEPALA SUB BIDANG PENDIDIKAN - POLITIK DAN PENINGKATAN DEMOKRASI	1	1,172	1	0	A		
50	- Analisis Pemilihan Umum	1	1,307	2	-1	A		
51	- Analisis Politik Dalam Negeri	1	1,2	1	0	A		
52	- Pengadministrasi Umum	1	2,053	2	-1	A		
53	KEPALA SUB BIDANG FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK	1	1,161	1	0	A		
54	- Analisis Partai politik	1	1,36	1	0	A		
55	- Analisis Politik Hukum dan Keamanan	1	1,307	1	0	A		
56	- Pengadministrasi Umum	0	2,387	2	-2	A		
57	- JF Analisis Kebijakan Pertama	0	8,472	8	-8	A		
58	- JF Perencana Pertama	0	7,667	8	-8	A		
59	- JF Penata Laksana Barang Pelaksana/Terampil	0	5,693	6	-6	A		
60	- JF Arsiparis Pertama	0	7,68	8	-8	A		
61	- JF Analisis Kebijakan Utama	0	1,613	2	-2	A		
62	- JF Analisis Kebijakan Madya	0	4,347	4	-4	A		
63	- JF Analisis Kebijakan Muda	0	4,28	4	-4	A		
64	- JF Perencana Utama	0	1,56	2	-2	A		
65	- JF Perencana Madya	0	5,392	5	-5	A		
66	- JF Perencana Muda	0	8,661	9	-9	A		
67	- JF Penata Laksana Barang Penyelia	0	7,573	8	-8	A		
68	- JF Penata Laksana Barang Pelaksana Lanjutan/Mahir	0	8,04	8	-8	A		
69	- JF Pranata Komputer Madya	0	4,16	4	-4	A		
70	- JF Pranata Komputer Muda	0	7,707	8	-8	A		
71	- JF Pranata Komputer Pertama	0	5,776	6	-6	A		
72	- JF Pranata Komputer Penyelia	0	5,52	6	-6	A		
73	- JF Arsiparis Madya	0	3,52	4	-4	A		
74	- JF Arsiparis Muda	0	7,907	8	-8	A		
75	- JF Arsiparis Pelaksana Lanjutan/Mahir	0	8,04	8	-8	A		
76	- JF Arsiparis Penyelia	0	6,147	6	-6	A		
77	- JF Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan/Mahir	0	7,893	8	-8	A		
78	- JF Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Madya	0	4,699	5	-5	A		
79	- JF Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Muda	0	7,907	8	-8	A		
80	- JF Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Pertama	0	7,829	8	-8	A		
81	- JF Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Penyelia	0	7,853	8	-8	A		
82	- JF Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Pelaksana Lanjutan/Mahir	0	8,093	8	-8	A		
	Jumlah	52	250.764	244	-191		3,05	A

GUBERNUR LAMPUNG,



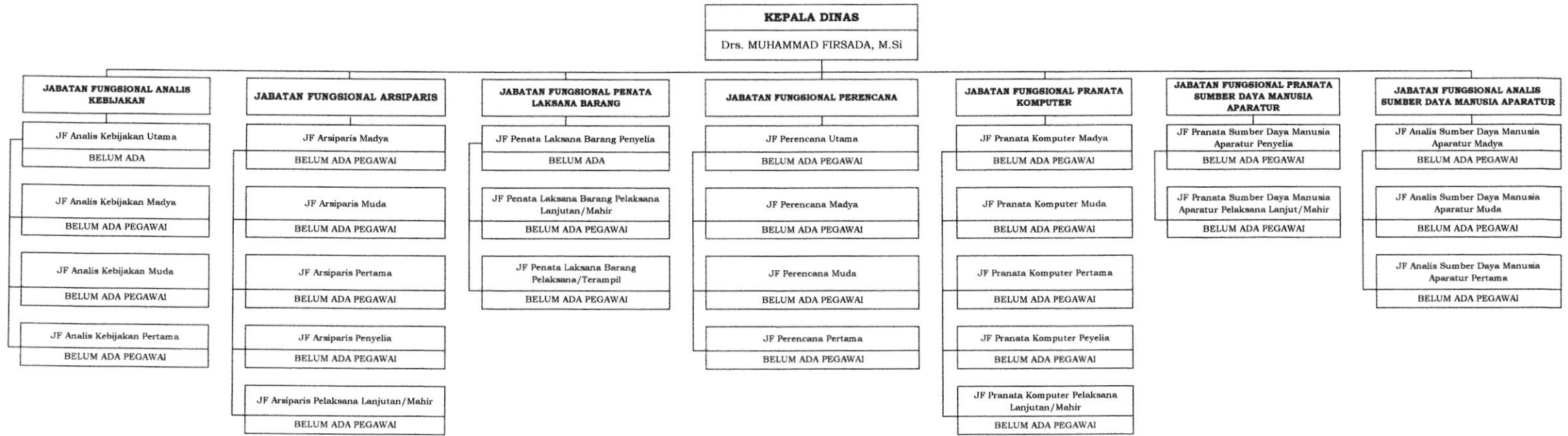
ARINAL DJUNAIDI

**2.1 PETA JABATAN STRUKTURAL DAN PELAKSANA HASIL PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI LAMPUNG**



KEPALA SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KERANGSAAN	BODI SURANTO, SE., MM	KEPALA SUB BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA	EMI MURNINGSIH, S.STP., MT	KEPALA SUB BIDANG PENDIDIKAN POLITIK DAN PENINGKATAN DEMOKRASI	RIFAL, SH	
	Analisis Wawasan Kelangkaan		Analisis Budaya Keagamaan		Analisis Pemilihan Umum	
	SRI HARYATUN, S.IP		NTA DWI SAPITRI, S.A.B		RAHMAT YUDHA KESATRIA, S.STP, MH	
	Drs. YUDA SETIAWAN MM				BELUM ADA PEGAWAI	
KEPALA SUB BIDANG BELA NEGARA DAN KARAKTER BANGSA	Analisis ideologi	KEPALA SUB BIDANG PEMANGKAPAN KONFLIK	Analisis Sosial Budaya	KEPALA SUB BIDANG FASILITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAH, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK	Analisis Politik Dalam Negeri	
	BELUM ADA PEGAWAI		ABDULLAH, SE		MARIA VIVERA, M.SI	
	Pengelola Data					
	BELUM ADA PEGAWAI		Pengadministrasi Umum		SULISDIANTO	
Analisis Dialog dan Wawasan Multikultural	SYAMSIR, S.IP	KEPALA SUB BIDANG ORGANISASI MASYARAKAT	Dra. TAVINA ARAFAH	KEPALA SUB BIDANG FASILITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAH, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK	HERIZA KURNIAWAN, SH., MIP	
	Analisis Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan		Analisis Organisasi Masyarakat		Analisis Partai Politik	
	KEMAS DEDY KURNIAWAN, S.IP		BELUM ADA PEGAWAI		SOPHIA MAYANG SARI, SE	
Analisis Pembelajaran Pembinaan Pendidikan Masyarakat	BELUM ADA PEGAWAI	KEPALA SUB BIDANG ORGANISASI MASYARAKAT	Analisis Pemberdayaan Masyarakat	KEPALA SUB BIDANG FASILITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAH, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK	Analisis Politik Hukum dan Keamanan	
			BELUM ADA PEGAWAI		BELUM ADA PEGAWAI	RACHMAT TRI SURYANTO, SE
	Pengadministrasi Umum		Pengadministrasi Umum		Pengadministrasi Umum	
HUDAWI		MOCHAMAD FAISOL		BELUM ADA PEGAWAI		
NUNUNG RESMIHATI						

**2.2 PETA JABATAN FUNGSIONAL HASIL PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

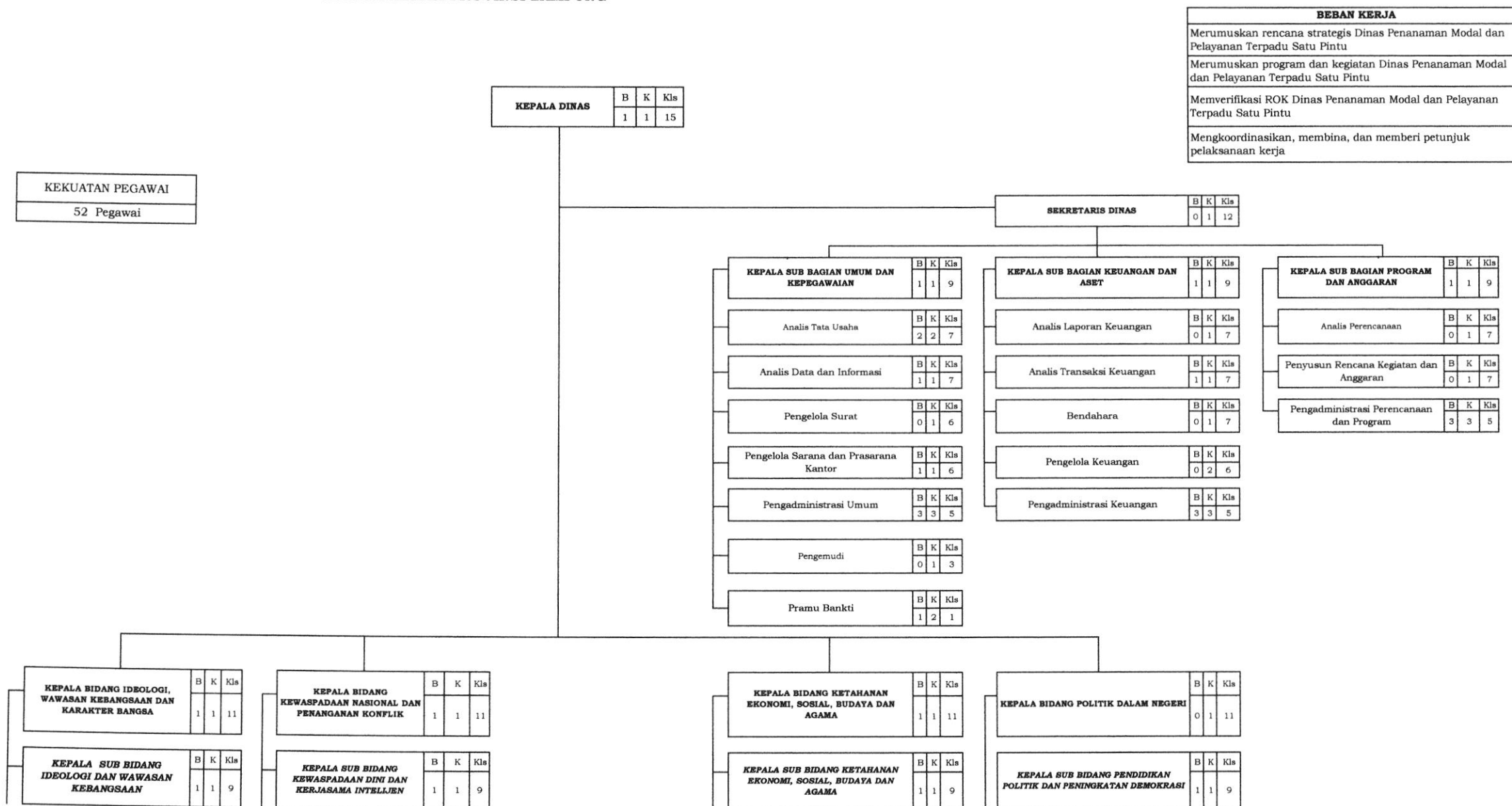


GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

**3.1 PETA JABATAN STRUKTURAL DAN PELAKSANA HASIL PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI LAMPUNG**



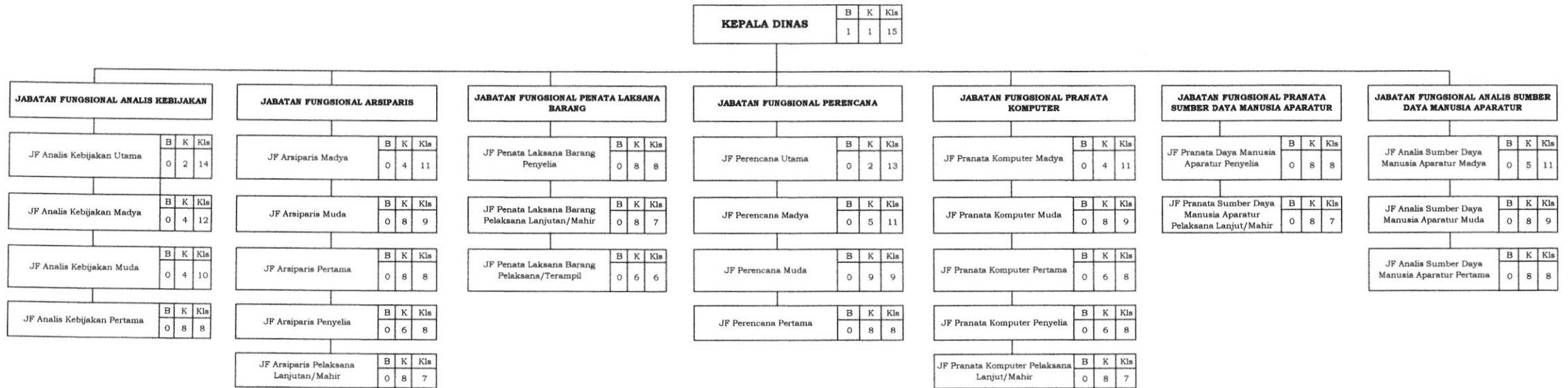
Analisis Wawasan Kebangsaan	B	K	Kls
	3	3	7
Analisis ideologi	B	K	Kls
	0	1	7
Pengelola Data	B	K	Kls
	0	1	6
KEPALA SUB BIDANG BELA NEGARA DAN KARAKTER BANGSA	B	K	Kls
	1	1	9
Analisis Dialog dan Wawasan Multikultural	B	K	Kls
	1	1	7
Analisis Pembelajaran Pembinaan Pendidikan Masyarakat	B	K	Kls
	0	1	7
Pengadministrasi Umum	B	K	Kls
	2	2	5

Analisis Orang Asing dan Lembaga Asing	B	K	Kls
	1	1	7
Analisis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	B	K	Kls
	2	2	7
Pengadministrasi Umum	B	K	Kls
	1	2	5
KEPALA SUB BIDANG PENANGANAN KONFLIK	B	K	Kls
	1	1	9
Analisis Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	B	K	Kls
	1	1	7
Analisis Program Kerjasama Lembaga Masyarakat	B	K	Kls
	2	2	7
Pengadministrasi Umum	B	K	Kls
	1	2	5

Analisis Budaya Keagamaan	B	K	Kls
	1	1	7
Analisis Sosial Budaya	B	K	Kls
	1	1	7
Pengadministrasi Umum	B	K	Kls
	0	2	5
KEPALA SUB BIDANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN	B	K	Kls
	1	1	9
Analisis Organisasi Masyarakat	B	K	Kls
	0	1	7
Analisis Pemberdayaan Masyarakat	B	K	Kls
	0	1	7
Pengadministrasi Umum	B	K	Kls
	1	2	5

Analisis Pemilihan Umum	B	K	Kls
	1	2	7
Analisis Politik Dalam Negeri	B	K	Kls
	1	1	7
Pengadministrasi Umum	B	K	Kls
	1	2	5
KEPALA SUB BIDANG FASILITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAH, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK	B	K	Kls
	1	1	9
Analisis Partai Politik	B	K	Kls
	1	1	7
Analisis Politik Hukum dan Keamanan	B	K	Kls
	1	1	7
Pengadministrasi Umum	B	K	Kls
	0	2	5

**3.2 PETA JABATAN FUNSIONAL HASIL PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI LAMPUNG**



GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI